

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Perbedaan gender memberikan pengaruh terhadap gaya kepemimpinan yang dianut oleh seorang pemimpin. Khususnya pada penelitian ini terlihat perbedaan antara gaya kepemimpinan perempuan dan laki-laki dalam implementasi kebijakan yang memperjuangkan hak anak dan perempuan yaitu Kota Layak Anak. Kota Tangerang Selatan yang dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan yaitu Airin berada di peringkat lebih tinggi daripada Kota Serang yang dipimpin oleh Syafruddin. Pada era kepemimpinannya Airin berhasil membawa Kota Tangsel mencapai posisi Nindya, sementara selama memimpin Kota Serang Syafruddin harus puas dengan posisi pratama yaitu berada dua tingkat dibawah Nindya. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan perbedaan kepemimpinan antara Airin dan Syafruddin yang dapat dilihat dari tiga kategori yaitu, dilihat dari gaya kepemimpinan, cara pengambilan keputusan dan penggunaan sumber daya.

##### **1. Gaya Kepemimpinan dalam Implementasi Kota Layak Anak**

Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara atasan dan bawahan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Franklyn (1951) gaya kepemimpinan terbagi menjadi tiga jenis yaitu gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis dan gaya kepemimpinan *Laissez-*

*Faire*. Pada implementasi kebijakan KLA ini kedua pemimpin memiliki orientasi gaya kepemimpinan yang berbeda. Airin sebagai pemimpin perempuan cenderung lebih dominan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini terlihat dari bagaimana cara Airin membangun hubungan baik dengan para jajarannya, mementingkan kerja sama tim serta rutin membangun komunikasi untuk menanyakan pendapat dan masukan dari para anggota Gugus Tugas KLA. Selama memimpin Airin selalu memastikan bahwa sinergitas diantara OPD terkait selalu terjalin dengan baik.

Berbeda dengan Airin, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Syafruddin dalam implementasi KLA ini lebih mengarah pada gaya kepemimpinan *Laissez-Faire*. Selama implementasi KLA berjalan dimasa kepemimpinannya, Syafruddin cenderung memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada para bawahannya terkait hal yang berhubungan dengan KLA ini. Kepemimpinan Syafruddin berorientasi pada hasil akhir dibanding proses pada implementasi KLA. Sehingga selama masa kepemimpinannya para staf dituntut untuk lebih aktif dan mandiri dalam melakukan pengambilan keputusan yang dianggap baik dalam KLA ini.

## 2. Pengambilan Keputusan dalam Implementasi Kota Layak Anak

Pada proses pengambilan keputusan seorang pemimpin pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Keputusan seorang pemimpin dalam menentukan suatu kebijakan tentu akan memiliki dampak terhadap program-program yang akan dijalankan. Kepemimpinan gender merupakan sebuah

bangunan kultural dan sosial yang pada akhirnya melahirkan perbedaan karakteristik maskulin dan feminim (Deaux dan Kite, 1987). Seorang pemimpin perempuan seringkali identik dengan karakter feminim Begitu juga pada kepemimpinan Airin dalam implementasi KLA ini, Airin memang terlihat menonjolkan sisi feminimnya dalam proses pengambilan keputusan. Namun, setelah diteliti lebih jauh pada proses pengambilan keputusan Airin berhasil memadukan karakter feminim dan maskulin yang ada pada dirinya. Hal ini terlihat dari sifat mengayomi, responsif seimbang dengan sikap tegas dan ambisiusnya dalam mengambil keputusan terkait KLA ini.

Pada kepemimpinan Syafruddin dalam KLA ini karakter maskulin sangat dominan dalam memberikan pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil. Selama memimpin Syafruddin memiliki jiwa kompetitif yang tinggi serta cenderung dingin dan tegas sehingga hubungan dan komunikasi dengan staf menjadi kurang baik. Sebagai seorang laki-laki tentu Syafruddin belum terbiasa dengan isu anak yang biasanya melekat pada perempuan. Sehingga karakter Syafruddin yang jauh dari gender feminim ini agak menyulitkan Syafruddin dalam mengambil keputusan terkait dengan KLA. Sehingga seringkali Syafruddin kurang responsif dalam menanggapi isu-isu terkait anak ini. Hal tersebut menyebabkan langkah beliau dalam mengambil keputusan selalu tertinggal dengan Airin.

### 3. Penggunaan Sumber Daya dalam Implementasi Kota Layak Anak

Pada implementasi kebijakan publik keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat melalui pendekatan yang lebih menekankan pada hasil atau *outcome* (Hughes, 1994). Hasil dari implementasi kebijakan publik sendiri sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber daya. Dalam implementasi Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang ini memang terlihat adanya perbedaan program prioritas dari kedua pemimpin sehingga *outcome* yang terlihat di lapangan juga berbeda. Airin sejak awal telah berkomitmen untuk memperjuangkan hak anak dan perempuan dalam masa kepemimpinannya. Hal ini sejalan ketika pada saat memimpin pengarusutamaan gender di Kota Tangerang Selatan sudah mulai terealisasikan salah satunya dengan kehadiran perempuan sebagai Kepala DP3AP2KB Kota Tangsel. Begitu juga dengan ketersediaan fasilitas anak dan mudah untuk diakses oleh seluruh kalangan sudah tersedia di Tangsel. Penggunaan sumber daya yang baik oleh Airin menjadikan *outcome* kebijakan KLA di Kota Tangsel tergolong baik dan sesuai dengan standar yang ada sehingga sejalan dengan penghargaan kategori Nindya yang telah diraih.

Berbeda dengan Kota Serang, selama kepemimpinannya KLA bukan merupakan program prioritas Syafruddin. Hal ini terlihat dari *outcome* kebijakan KLA yang lima tahun berturut-turut masih berada di kategori Pratama. Iklan rokok yang masih banyak ditemukan disepanjang jalan protokol Kota Serang, hingga kurangnya fasilitas taman bermain dan RTH serta APS yang mengalami penurunan menjadi catatan selama kepemimpinan

Syafruddin. Selain itu, komunikasi serta sinergitas yang masih belum terbangun hingga saat ini dalam implementasi KLA menunjukkan adanya masalah terkait SDM pada Gugus Tugas KLA Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Airin lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan yang menyangkut hak anak. Kebijakan yang memperjuangkan hak anak sejatinya sangat penting bagi masa depan bangsa, Indonesia sendiri perlu mempersiapkan diri dalam menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa kepemimpinan gender memiliki hasil yang lebih efektif jika menyangkut tentang isu anak. Oleh karena itu keberadaan pengarusutamaan gender sangat penting guna keberjalanan suatu kebijakan.

#### **4.2. Saran**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan gender memberikan pengaruh yang cukup besar pada kebijakan-kebijakan yang kurang mendapatkan perhatian, seperti pada kebijakan yang menyangkut hak anak. Padahal Indonesia sendiri sedang dihadapi dengan ancaman bonus demografi. Lemahnya perhatian terhadap hak anak ini sejalan dengan kurangnya pengarusutamaan gender, karena orientasi antara pemimpin perempuan dan laki-laki dilihat dari ketiga kategori diatas ternyata memiliki perbedaan. Hal ini sejalan dengan perbedaan implementasi kebijakan KLA pada Kota Tangsel yang dipimpin oleh Airin dan Kota Serang yang dipimpin oleh Syafruddin. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Pemerintah Kota untuk mengupayakan keberjalanan kebijakan KLA dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin di capai, maka Pemkot perlu memperhatikan pengarusutamaan gender pada struktur birokrasi pemerintahan. Selain itu, wali kota sebagai seorang pemimpin juga perlu untuk melakukan program yang berkaitan dengan pengembangan manusia, penguatan organisasi demi terwujudnya sinergitas diantara SKPD atau anggota Satuan Gugus Tugas KLA.
2. Bagi masyarakat diharapkan mampu membantu untuk memberikan kontribusinya dalam menyuarkan hak anak dan perempuan. Karena berhasil atau tidaknya seorang pemimpin juga ditentukan oleh sikap masyarakat sebagai penerima kebijakan tersebut.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik serupa dimasa mendatang diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam guna meningkatkan kesetaraan gender sebagai upaya untuk terus memperjuangkan hak anak dan perempuan.